INTEGRASI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KOTA KASIH (KARYA, AMAN, SEHAT, INDAH, DAN HARMONIS) DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Putri Meychin

NPP. 33.0695

Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: meychinputri@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto S.STP.,M.Si.,M.H

Email: tri.rahardjanto73@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study addresses social heterogeneity and the potential for social fragmentation in Kupang City, the capital of East Nusa Tenggara Province, which is characterized by ethnic, religious, and cultural diversity. Although several previous studies have discussed religious tolerance, social harmony, and city branding separately, limited attention has been given to how the civil sphere operates within the development agenda of Kupang as KASIH City.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze social integration in building Kupang as KASIH City (Karya, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis) and to identify its supporting and inhibiting factors.* ***Method:*** *The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with six informants from government institutions, FKUB, and community members, supported by field observation and document analysis.* ***Result:*** *The findings indicate that social integration is reflected in active participation through inclusive Musrenbang and RPJMD 2025-2029, cross-identity solidarity through active interreligious tolerance, and recognition of different groups' rights through non-discriminatory public services and social programs. The supporting factors are strong social capital, intergroup tolerance, FKUB facilitation, and inclusive local government commitment, while the inhibiting factors include primordialism, possible political exploitation of identity, and socio-economic inequality.* ***Conclusion:*** *Social integration in Kupang is effective because civic participation, solidarity, and rights recognition reinforce one another within the civil sphere. Strengthening youth dialogue, inclusive policy evaluation, and inequality reduction is required to sustain Kupang as KASIH City.*

Keywords: *civil sphere; KASIH City; social cohesion; social integration; social harmony*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada heterogenitas sosial dan potensi fragmentasi sosial di Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya. Kajian terdahulu telah membahas toleransi antaragama, harmoni sosial, dan branding kota secara terpisah, tetapi belum banyak yang menjelaskan bagaimana civil sphere bekerja dalam agenda pembangunan Kota KASIH. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sosial dalam membangun Kota KASIH (Karya, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis) di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan dari unsur pemerintah, FKUB, dan masyarakat, serta didukung observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sosial terwujud melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang dan RPJMD 2025-2029, solidaritas lintas identitas melalui toleransi aktif antarumat beragama, serta pengakuan hak kelompok berbeda melalui pelayanan publik dan program sosial yang non-diskriminatif. Faktor pendukungnya adalah modal sosial masyarakat, toleransi antarkelompok, peran FKUB, dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan inklusif, sedangkan faktor penghambatnya adalah primordialisme, potensi politisasi identitas, dan ketimpangan sosial-ekonomi. **Kesimpulan:** Integrasi sosial di Kota Kupang berjalan baik karena partisipasi warga, solidaritas lintas identitas, dan pengakuan hak kelompok berbeda saling menopang dalam ruang civil sphere, sehingga perlu diperkuat melalui dialog generasi muda, evaluasi kebijakan inklusif, dan percepatan penanganan ketimpangan sosial.

Kata kunci: civil sphere; integrasi sosial; Kota KASIH; social cohesion; social harmony

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, dan mobilitas sosial budaya di wilayah Indonesia Timur. Posisi tersebut menjadikan Kota Kupang sebagai ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Berdasarkan publikasi Kota Kupang Dalam Angka 2025, BPS Kota Kupang menyajikan gambaran geografi, sosial, ekonomi, dan kependudukan Kota Kupang sebagai dasar membaca dinamika pembangunan daerah (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2025).

Keragaman sosial Kota Kupang merupakan modal sosial sekaligus tantangan pembangunan. Di satu sisi, keberagaman dapat memperkuat identitas kota sebagai ruang hidup bersama yang terbuka. Di sisi lain, heterogenitas yang tidak dikelola secara inklusif dapat memunculkan fragmentasi sosial, sentimen primordial, atau ketegangan antarkelompok. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak cukup dipahami sebagai pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga sebagai proses membangun integrasi sosial dan kepercayaan antarwarga.

Sejak ditetapkan sebagai Kotamadya, Kota Kupang dikenal dengan identitas Kota KASIH, yaitu Karya, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis. Identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai branding wilayah, tetapi juga sebagai arah normatif pembangunan kota. Dalam RPJMD 2025-2029, konsep Kota KASIH diarahkan untuk membangun Kota Kupang yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan Kota KASIH sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat menjaga harmoni sosial, memperluas partisipasi publik, dan memastikan semua kelompok mendapat pengakuan yang setara.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep *civil sphere* Jeffrey C. Alexander. *Civil sphere* memandang masyarakat sipil sebagai ruang solidaritas, pengakuan hak, dan komunikasi moral yang memungkinkan kelompok berbeda membangun kehidupan bersama (Alexander, 2006). Dalam konteks Kota Kupang, *civil sphere* relevan karena integrasi sosial tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari praktik sosial sehari-hari, dialog antarumat, Musrenbang, peran FKUB, dan komitmen pembangunan inklusif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

(Kalsum & Fauzan, 2019) menjelaskan integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat Kabupaten Pesawaran melalui pendekatan fungsionalisme struktural. (Widarjanto & Susilo, 2016) membahas integrasi sosial di kawasan transmigrasi dengan menekankan keterkaitan antara kawasan transmigrasi dan desa sekitar. Kedua penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa integrasi sosial dipengaruhi oleh toleransi, partisipasi, nilai dasar, agama, struktur sosial, dan interaksi sehari-hari. Namun, keduanya belum secara khusus mengaitkan integrasi sosial dengan branding pembangunan kota dan kebijakan pembangunan daerah berbasis identitas lokal.

(Sena, 2020) membahas peran umat Hindu dan Kristen dalam menjaga toleransi di Kota Kupang. (Saudale et al., 2025) membahas toleransi antaragama dalam perspektif civil sphere di Kota Kupang dan menunjukkan bahwa dialog antaragama, keterlibatan komunitas dalam perayaan keagamaan, serta tindakan simbolik memperkuat harmoni sosial. (Sihombing et al., 2025) juga menggunakan civil sphere untuk menjelaskan harmoni sosial Islam-Kristen di Desa Inklusi Bah Sulung. Namun, kajian tersebut lebih menekankan toleransi keagamaan dan simbol sosial, belum mengaitkannya secara komprehensif dengan Musrenbang, RPJMD, kebijakan non-diskriminatif, dan agenda pembangunan Kota KASIH.

Kajian tentang branding cenderung menempatkan identitas kota sebagai strategi promosi, citra wilayah, atau daya tarik daerah. Dalam konteks Kota Kupang, Kota KASIH memiliki posisi lebih luas karena tidak hanya menjadi label kota, melainkan memuat agenda sosial, politik, dan pembangunan. Kesenjangan yang belum terjawab adalah bagaimana branding Kota KASIH diterjemahkan menjadi praktik civil sphere yang konkret melalui partisipasi ruang publik, solidaritas lintas identitas, dan pengakuan terhadap hak kelompok berbeda.

Berdasarkan celah tersebut, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan antara kajian integrasi sosial, toleransi antaragama, dan pembangunan daerah berbasis identitas Kota KASIH. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bahwa Kota Kupang harmonis, tetapi menunjukkan bagaimana harmoni itu diproduksi, dijaga, dan dilembagakan melalui ruang publik, kebijakan pembangunan, dialog lintas komunitas, dan pelayanan non-diskriminatif.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Kota Kupang memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi sekaligus reputasi sebagai salah satu kota yang relatif toleran. Keadaan ini perlu dijelaskan secara ilmiah agar harmoni sosial tidak hanya dipandang sebagai kondisi alamiah, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara modal sosial masyarakat, fasilitasi kelembagaan, dan kebijakan pemerintah daerah.

Urgensi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan Pemerintah Kota Kupang untuk memiliki dasar empiris dalam memperkuat program Kota KASIH. Jika faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial tidak dipetakan, pemerintah berisiko menyusun program yang tidak menyentuh akar persoalan sosial, terutama terkait primordialisme, ketimpangan sosial-ekonomi, dan tantangan generasi muda di ruang digital.

Urgensi akademik penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *civil sphere* dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa *civil sphere* bukan hanya teori tentang masyarakat sipil dalam demokrasi modern, tetapi dapat digunakan untuk membaca perencanaan pembangunan, kebijakan inklusif, dan praktik toleransi lokal dalam membangun *social cohesion*.

1.4 Penelitian Terdahulu

(Kalsum & Fauzan, 2019) menekankan pentingnya konsensus sosial, toleransi, dan fungsi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat. (Widarjanto & Susilo, 2016)menunjukkan bahwa integrasi sosial di kawasan transmigrasi dapat muncul melalui interaksi, kerja sama, nilai dasar, dan dukungan struktur sosial. Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas integrasi sosial dalam masyarakat majemuk. Perbedaannya, penelitian ini menempatkan integrasi sosial dalam konteks kota multikultural dan agenda pembangunan Kota KASIH.

(Sena, 2020) menemukan bahwa toleransi masyarakat Kota Kupang didukung oleh sikap empati, keterbukaan, dan peran komunitas agama. (Saudale et al., 2025) menunjukkan bahwa praktik toleransi di Kupang terwujud melalui dialog antaragama dan tindakan simbolik yang mencerminkan solidaritas sosial. (Sihombing et al., 2025) menjelaskan bahwa program desa inklusi dapat menjadi ruang bersama untuk membangun harmoni sosial. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan melihat toleransi bukan hanya sebagai relasi keagamaan, tetapi sebagai bagian dari *civil sphere* yang terhubung dengan perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengakuan hak kelompok berbeda.

Qi, Mazumdar, dan Vasconcelos (2024) menegaskan bahwa ruang publik memberi peluang bagi interaksi budaya dan sosial yang menjadi elemen penting *social cohesion*. Aelbrecht, Stevens, dan Kumar (2022) menunjukkan bahwa desain ruang publik dapat memfasilitasi *social cohesion* dalam lingkungan multikultural. (Riazi et al., 2026)menegaskan bahwa *social cohesion* bersifat multidimensional dan perlu dibaca melalui relasi sosial, kepercayaan, nilai bersama, serta dukungan institusional. Penelitian-penelitian internasional tersebut memberi dasar teoretis untuk memahami bahwa integrasi sosial di Kota Kupang harus dianalisis melalui interaksi ruang publik, institusi, dan struktur sosial.

Sintesis dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian sebelumnya telah menjelaskan integrasi sosial, toleransi, dan *social cohesion*, tetapi belum banyak yang mengaitkan ketiganya dengan *civil sphere* dalam agenda pembangunan kota berbasis identitas Kota KASIH. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini adalah menghubungkan teori *civil sphere* dengan praktik pembangunan daerah, partisipasi publik, solidaritas lintas identitas, serta pengakuan hak kelompok berbeda di Kota Kupang.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggunaan teori *civil sphere* untuk menganalisis integrasi sosial dalam pembangunan daerah berbasis identitas Kota KASIH. Penelitian terdahulu tentang Kota Kupang cenderung membahas toleransi antaragama, sedangkan penelitian ini memperluas analisis dengan menempatkan Musrenbang, RPJMD 2025-2029, FKUB, pelayanan publik, program bantuan sosial, dan pengakuan terhadap kelompok berbeda sebagai bagian dari mekanisme *civil sphere*.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperluas penerapan *civil sphere* dalam kajian integrasi sosial perkotaan di Indonesia Timur. *Civil sphere* tidak hanya dipahami sebagai ruang diskursif masyarakat sipil, tetapi juga sebagai mekanisme yang menghubungkan partisipasi publik, solidaritas lintas identitas, pengakuan hak, dan kebijakan pembangunan inklusif.

Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan kerangka evaluasi bagi Pemerintah Kota Kupang, FKUB, Kesbangpol, Bappeda, dan perangkat daerah lain untuk menjaga keberlanjutan Kota KASIH. Kerangka ini menegaskan bahwa *branding* Kota KASIH harus dibuktikan melalui kebijakan konkret yang non-diskriminatif, forum dialog lintas komunitas, perencanaan partisipatif, dan penanganan ketimpangan sosial-ekonomi

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana integrasi sosial terwujud dalam membangun Kota KASIH (Karya, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis) di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam perspektif *civil sphere*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena peneliti bertujuan menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena integrasi sosial dalam membangun Kota KASIH di Kota Kupang. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata, melainkan melalui makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan dalam pengelolaan serta pelaksanaan program pembangunan Kota KASIH. Informan penelitian terdiri dari enam orang, yaitu: (1) Pejabat Dinas Sosial Kota Kupang sebagai informan kunci terkait program sosial inklusif; (2) Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol Kota Kupang (I2) terkait kerukunan dan pencegahan konflik; (3) Pejabat BAPPEDA Kota Kupang (I3) terkait perencanaan pembangunan inklusif; (4) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB Kota Kupang terkait dialog lintas komunitas; (5) Masyarakat keturunan Tionghoa beragama Katolik; serta (6) Masyarakat pendatang dari Jawa (I6) sebagai penerima manfaat langsung dari program integrasi sosial.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat; triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta member check kepada informan. Analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014), yaitu melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Januari hingga Maret 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam terhadap informan terkait, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis integrasi sosial dalam membangun Kota KASIH di Kota Kupang menggunakan teori *civil sphere* Jeffrey C. Alexander. Tiga dimensi yang digunakan adalah partisipasi aktif di ruang publik, solidaritas lintas identitas, dan pengakuan terhadap hak-hak kelompok yang berbeda. Analisis ini juga memperhatikan faktor pendukung dan penghambat agar pembahasan tidak berhenti pada deskripsi harmoni, tetapi mampu menjelaskan mekanisme keberhasilan dan tantangan keberlanjutan integrasi sosial.

3.1 Partisipasi Aktif di Ruang Publik

Partisipasi aktif masyarakat di ruang publik merupakan dimensi pertama dalam *civil sphere* yang menjadi indikator terwujudnya integrasi sosial di Kota Kupang. Partisipasi ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang inklusif yang melibatkan

semua kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Musrenbang menjadi arena di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah.

Hasil wawancara dengan pejabat Bappeda Kota Kupang mengungkapkan bahwa integrasi sosial bukan dipandang sebagai program tersendiri, melainkan sebagai jiwa yang harus melekat di setiap program pembangunan yang direncanakan. RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan bersama DPRD menjadi dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai kontrak sosial, di mana penanganan kemiskinan ekstrem dan pemerataan ekonomi masuk sebagai prioritas utama. Dokumen ini menjamin bahwa semua program pembangunan dirancang dengan prinsip non-diskriminatif dan inklusif terhadap semua kelompok.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Kupang berhasil merealisasikan pembangunan 30 unit rumah layak huni yang tersebar di 21 kelurahan pada enam kecamatan se-Kota Kupang. Dari 30 unit tersebut, 28 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan 2 unit untuk warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Total anggaran yang digunakan sebesar 2,4 miliar rupiah dari APBD Kota Kupang. Program ini mencerminkan partisipasi aktif pemerintah dalam mewujudkan prinsip Karya dan Sehat dalam visi Kota KASIH.

Partisipasi aktif di ruang publik merupakan dimensi pertama *civil sphere*. Dalam konteks Kota Kupang, partisipasi ini tampak melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, dan proses penyusunan RPJMD 2025-2029. Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai ruang sipil tempat warga dari latar belakang berbeda menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan kritik terhadap arah pembangunan kota.

Hubungan antara Musrenbang, RPJMD, dan integrasi sosial dapat dipahami sebagai hubungan antara ruang partisipasi, dokumen kebijakan, dan pengakuan kolektif. Musrenbang menjadi arena deliberasi warga, sedangkan RPJMD menjadi bentuk pelembagaan aspirasi masyarakat ke dalam agenda pembangunan daerah. Dalam perspektif *civil sphere*, proses ini menunjukkan bahwa integrasi sosial membutuhkan ruang komunikasi yang memungkinkan warga merasa menjadi bagian dari kota dan memiliki hak yang sama untuk memengaruhi keputusan publik (Yani, 2018).

RPJMD 2025-2029 dapat dipahami sebagai *social contract* karena memuat arah pembangunan Kota KASIH yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketika prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, pemerataan ekonomi, dan pelayanan sosial dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah tidak hanya menyusun program pembangunan, tetapi juga membangun legitimasi sosial bahwa semua kelompok warga berhak memperoleh manfaat Pembangunan (Chumairah, 2019).

Temuan ini sejalan dengan (Qi et al., 2024) yang menegaskan bahwa ruang publik dapat menjadi media interaksi sosial dan cultural activities yang memperkuat *social cohesion*. Dalam konteks Kota Kupang, ruang publik tidak hanya berupa ruang fisik, tetapi juga forum partisipasi kebijakan seperti Musrenbang. Dengan demikian,

partisipasi aktif di ruang publik memperkuat integrasi sosial karena warga diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima program.

3.2 Solidaritas Lintas Identitas

Solidaritas lintas identitas merupakan dimensi kedua *civil sphere* yang terlihat kuat di Kota Kupang. Solidaritas ini tidak hanya berupa sikap pasif untuk membiarkan perbedaan, tetapi berupa toleransi aktif yang tercermin dalam kebiasaan saling menghargai, membantu, dan ikut merayakan kebahagiaan kelompok lain. Praktik ini menjadi dasar penting mengapa Kota Kupang mampu mempertahankan harmoni sosial di tengah keragaman etnis dan agama.

Pejabat Badan Kesbangpol Kota Kupang menyampaikan salah satu momen paling berkesan yang menggambarkan solidaritas nyata di Kota Kupang: ketika iring-iringan pawai takbiran melintas di kawasan yang mayoritas berpenduduk Kristen, warga justru keluar rumah bertepuk tangan menyambut rombongan, bahkan memberikan minuman kepada peserta pawai yang kelelahan. Momen seperti ini menunjukkan bahwa toleransi di Kupang bersifat organik dan tidak dipaksakan.

FKUB Kota Kupang memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan mendampingi komunitas yang secara jumlah lebih kecil agar merasa aman dalam menjalankan keyakinan mereka. Ketua FKUB menegaskan bahwa toleransi di Kupang bukan sekadar diam-diam, melainkan toleransi yang aktif dan *celebratory*, di mana warga saling merasakan kebahagiaan perayaan kelompok lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jadwal pengumuman di gereja dan masjid yang bersebelahan disesuaikan secara sukarela sebagai wujud toleransi nyata.

Faktor yang menyebabkan toleransi dan integrasi sosial di Kota Kupang dapat dipertahankan secara berkelanjutan dibandingkan daerah lain yang memiliki heterogenitas serupa antara lain adalah kuatnya modal sosial masyarakat, pengalaman hidup bersama antarkelompok sejak lama, peran tokoh agama dan adat sebagai penyejuk sosial, peran FKUB sebagai mediator lintas iman, serta komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog. Dengan demikian, toleransi di Kupang bukan hanya hasil kebijakan formal, tetapi juga hasil pembiasaan sosial yang berlangsung dalam keluarga, lingkungan, sekolah, tempat ibadah, dan ruang publik.

Keberlanjutan solidaritas juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat memisahkan perbedaan identitas dari konflik politik (Lymperopoulou et al., 2022). Primordialisme memang masih ada, tetapi tidak berkembang menjadi konflik terbuka karena terdapat mekanisme sosial yang menahannya, seperti dialog FKUB, komunikasi tokoh agama, dan kesadaran warga bahwa stabilitas sosial merupakan kepentingan bersama. Dalam kerangka *civil sphere*, mekanisme ini menunjukkan adanya moral discourse yang menempatkan semua warga sebagai bagian dari komunitas sipil yang setara.

Temuan ini memperkuat (Saudale et al., 2025) yang menunjukkan bahwa toleransi di Kota Kupang terwujud melalui dialog antaragama, keterlibatan komunitas dalam perayaan keagamaan, dan tindakan simbolik yang membangun solidaritas sosial.

Namun, penelitian ini menambahkan bahwa solidaritas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas Kota KASIH, kerja kelembagaan FKUB dan Kesbangpol, serta kebijakan pembangunan inklusif pemerintah daerah.

3.3 Pengakuan terhadap Hak-Hak Kelompok yang Berbeda

Dimensi ketiga *civil sphere* yaitu pengakuan terhadap hak-hak kelompok yang berbeda terwujud melalui komitmen pemerintah Kota Kupang dalam menjalankan prinsip non-diskriminasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Dinas Sosial mengelola program bantuan sosial yang dirancang berdasarkan kondisi ekonomi penerima, bukan latar belakang agama atau suku. Program KUBE yang difasilitasi bersama Bappeda sengaja memadukan anggota dari berbagai komunitas sehingga program ekonomi sekaligus menjadi jembatan sosial.

Dari perspektif masyarakat, warga keturunan Tionghoa beragama Katolik yang telah empat generasi tinggal di Kupang menyatakan rasa memiliki yang kuat terhadap kota ini, mengidentifikasi diri sebagai "orang Kupang" bukan sebagai kelompok minoritas yang termarginalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan iklim sosial Kota Kupang berhasil menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk merasa diakui dan diterima.

Contoh kebijakan konkret yang mencerminkan prinsip *non-diskriminasi* adalah program bantuan sosial yang diberikan berdasarkan kondisi ekonomi penerima, bukan identitas agama atau etnis (Sukadi, 2021). Dinas Sosial menempatkan kelayakan penerima sebagai dasar kebijakan sehingga kelompok rentan dapat memperoleh layanan secara setara. Program perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi contoh bahwa pembangunan diarahkan pada kebutuhan sosial warga tanpa membedakan identitas kelompok (Funai & Martua, 2025).

Pengakuan hak kelompok berbeda juga terlihat dalam pelibatan FKUB dalam menjaga kebebasan beragama dan memfasilitasi komunikasi antarumat. FKUB berperan memastikan bahwa komunitas agama yang jumlahnya lebih kecil tetap merasa aman dan diakui dalam menjalankan keyakinannya. Dalam kehidupan sosial, pengakuan ini ditunjukkan oleh pengalaman masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang yang merasa menjadi bagian dari Kota Kupang.

Secara teoretis, pengakuan hak merupakan komponen penting *civil sphere* karena integrasi sosial tidak cukup dibangun melalui toleransi, tetapi juga memerlukan perlakuan setara dalam institusi publik (Tory, 2025). Dengan demikian, Kota KASIH harus dipahami sebagai agenda pembangunan yang menggabungkan solidaritas moral dan kebijakan administratif yang inklusif.

3.4 Faktor Pendukung Integrasi Sosial

Faktor pendukung utama integrasi sosial di Kota Kupang adalah toleransi antarkelompok yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Toleransi tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup bersama, interaksi sehari-hari, gotong royong, dan relasi sosial yang tidak selalu ditentukan oleh batas agama atau suku. Modal sosial ini

menjadi fondasi yang membuat kebijakan pemerintah lebih mudah diterima.

Faktor pendukung berikutnya adalah komunikasi efektif melalui dialog lintas komunitas. FKUB, Kesbangpol, tokoh agama, dan tokoh adat berperan sebagai jembatan komunikasi ketika terdapat potensi ketegangan. Dialog tidak hanya digunakan setelah konflik muncul, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka (Reibold et al., 2025).

Faktor ketiga adalah komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan inklusif. Melalui Musrenbang, RPJMD, dan program sosial lintas komunitas, pemerintah memberi ruang agar berbagai kelompok dapat ikut terlibat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep *social cohesion* yang menekankan pentingnya relasi horizontal antarkelompok dan relasi vertikal antara warga dengan institusi.

3.5 Faktor Penghambat Integrasi Sosial

Pertama, primordialisme yang masih muncul dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Kupang. Dalam pergaulan sosial, sebagian warga masih lebih nyaman bergaul hanya dengan sesama suku atau agamanya sendiri. Dalam pemilihan mitra usaha, pertimbangan latar belakang identitas masih kadang muncul. Yang paling perlu diwaspadai adalah ketika sentimen primordial dipolitisasi dalam momen kontestasi seperti pemilihan kepala daerah. Pejabat Bappeda mengakui bahwa primordialisme ada namun masih dalam batas yang terkendali dan tidak sampai memicu konflik terbuka. FKUB secara aktif turun ke komunitas-komunitas menjelang setiap momen pemilihan untuk mengingatkan agar masyarakat memilih berdasarkan kapasitas dan rekam jejak calon. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan merasa lebih nyaman bergaul, bekerja sama, atau memilih dukungan politik berdasarkan kedekatan identitas suku, agama, atau asal daerah. Primordialisme ini belum menjadi konflik terbuka, tetapi dapat menjadi ancaman apabila dimobilisasi dalam kontestasi politik.

Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial. Data BPS Kota Kupang tahun 2024 menunjukkan masih terdapat 868 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Kelapa Lima sebanyak 407 unit. Pejabat Dinas Sosial menegaskan bahwa yang paling dikhawatirkan adalah ketika ketimpangan ini mulai dikaitkan dengan identitas kelompok, di mana seseorang yang merasa kalah bersaing secara ekonomi mulai menyalahkan kelompok lain yang berbeda agama atau suku. Untuk mencegah kondisi tersebut, pemerintah kota menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang secara lintas komunitas. Ketimpangan dapat mengganggu integrasi sosial apabila warga mulai menghubungkan kesenjangan ekonomi dengan identitas kelompok tertentu. Data mengenai rumah tidak layak huni menunjukkan bahwa persoalan sosial-ekonomi masih perlu ditangani secara lebih merata. Dalam perspektif *civil sphere*, ketimpangan dapat melemahkan rasa kesetaraan moral antarwarga.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sosial di Kota Kupang bekerja melalui hubungan antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah. Dalam perspektif *civil sphere*, integrasi sosial tidak hanya terbentuk karena warga hidup berdampingan, tetapi karena terdapat ruang publik, simbol kebersamaan, dan institusi yang mengakui kesetaraan warga.

Sama halnya dengan temuan (Saudale et al., 2025), penelitian ini menemukan bahwa toleransi di Kota Kupang terwujud melalui dialog antaragama dan tindakan simbolik yang memperkuat solidaritas. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa toleransi juga terhubung dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD 2025-2029 dan mekanisme Musrenbang sebagai ruang partisipasi publik (Republik Indonesia, 2014).

Berbeda dengan (Widarjanto & Susilo, 2016) yang menemukan integrasi sosial di kawasan transmigrasi lebih dipengaruhi oleh faktor keterkaitan kawasan, nilai dasar, struktur, dan fungsi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sosial perkotaan di Kota Kupang lebih banyak ditopang oleh kombinasi modal sosial organik, dialog kelembagaan, kebijakan inklusif, dan identitas Kota KASIH. Perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi sosial di wilayah perkotaan multikultural membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dibanding integrasi sosial di kawasan perdesaan (Republik Indonesia, 1996).

Temuan ini juga memperkuat (Kalsum & Fauzan, 2019) yang menyatakan bahwa integrasi sosial dibangun melalui keharmonisan, toleransi, dan kesepakatan nilai. Akan tetapi, kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diformalisasi dalam agenda pembangunan daerah. Dengan kata lain, Kota KASIH bukan hanya slogan, tetapi dapat menjadi perangkat kebijakan untuk menjaga *social harmony*.

Kontribusi terhadap teori *civil sphere* terletak pada pembuktian bahwa ruang sipil tidak hanya muncul dalam diskursus masyarakat sipil, tetapi juga melalui mekanisme pemerintahan daerah. Musrenbang, RPJMD, program bantuan sosial, dialog FKUB, dan pelayanan publik merupakan instrumen yang dapat memperkuat *civil sphere* apabila dijalankan secara inklusif. Kontribusi terhadap pembangunan inklusif adalah penegasan bahwa program pembangunan harus mengurangi ketimpangan dan memperkuat rasa memiliki semua kelompok terhadap kota (Soekanto & Sulistyowati, 2013). Kontribusi terhadap kajian integrasi sosial di Indonesia adalah pemberian contoh bahwa kota multikultural di Indonesia Timur dapat menjaga kohesi melalui perpaduan modal sosial, fasilitasi kelembagaan, dan komitmen kebijakan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama adalah kuatnya toleransi organik masyarakat Kota Kupang. Toleransi ini tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi lahir dari pengalaman hidup bersama yang panjang. Dalam perspektif *civil sphere*, toleransi organik menjadi modal moral yang memungkinkan warga menerima perbedaan sebagai bagian normal dari kehidupan kota. Temuan menarik kedua adalah

pentingnya FKUB sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. FKUB tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi berfungsi sebagai aktor sipil yang menjaga komunikasi lintas iman, meredam potensi ketegangan, dan memperkuat narasi kebersamaan. Peran ini membuat *social cohesion* lebih tahan terhadap provokasi identitas.

Temuan menarik ketiga adalah adanya hambatan primordialisme dan ketimpangan sosial-ekonomi yang bersifat laten. Kedua faktor ini tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi dapat mengganggu integrasi sosial apabila bertemu dengan kontestasi politik, kesenjangan pelayanan, atau provokasi media sosial. Karena itu, keberhasilan integrasi sosial tidak boleh hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan kota mengurangi ketimpangan dan memperluas pengakuan terhadap semua kelompok. Temuan menarik keempat adalah kebutuhan memperkuat integrasi sosial generasi muda. Generasi muda hidup dalam ruang digital yang lebih terbuka terhadap pengaruh informasi negatif. Oleh karena itu, keberlanjutan Kota KASIH membutuhkan strategi khusus berupa dialog lintas komunitas bagi pemuda, literasi digital toleransi, dan pelibatan anak muda dalam Musrenbang serta program sosial lintas identitas.

Temuan menarik lain dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi sosial di Kota Kupang tidak hanya terbentuk melalui kebijakan formal pemerintah, tetapi juga ditopang oleh faktor sosial yang tumbuh secara organik dalam kehidupan masyarakat. Faktor pendukung utama integrasi sosial adalah toleransi antarkelompok yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi tersebut tampak melalui kebiasaan saling menghargai, gotong royong, keterbukaan terhadap pendatang, serta penerimaan terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi sosial di Kota Kupang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Faktor pendukung berikutnya adalah komunikasi efektif melalui dialog lintas komunitas. Peran FKUB, Kesbangpol, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah menjadi penting dalam menjaga ruang komunikasi antarwarga. Dialog lintas komunitas berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik, penguatan kepercayaan sosial, dan pemeliharaan solidaritas lintas identitas. Dalam perspektif *civil sphere*, mekanisme dialog ini menunjukkan bahwa integrasi sosial membutuhkan ruang komunikasi yang memungkinkan kelompok berbeda saling memahami dan merasa diakui sebagai bagian dari komunitas kota yang sama.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah primordialisme, yaitu kecenderungan sebagian masyarakat untuk lebih dekat dengan kelompok yang memiliki kesamaan agama, suku, atau asal daerah. Primordialisme belum berkembang menjadi konflik terbuka, tetapi tetap perlu diwaspadai karena dapat dimanfaatkan dalam kontestasi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Apabila tidak dikelola, primordialisme dapat melemahkan solidaritas lintas identitas yang selama ini menjadi kekuatan Kota Kupang.

Faktor penghambat kedua adalah ketimpangan sosial-ekonomi. Ketimpangan dapat mengganggu integrasi sosial apabila masyarakat mulai mengaitkan kesenjangan ekonomi dengan identitas kelompok tertentu. Dalam konteks ini, keberhasilan Kota KASIH tidak cukup hanya diukur dari tingginya toleransi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses pelayanan publik, dan memastikan bahwa pembangunan dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat.

Temuan menarik lainnya adalah pentingnya generasi muda dalam menjaga keberlanjutan integrasi sosial. Generasi muda hidup dalam ruang digital yang lebih terbuka terhadap informasi, termasuk informasi yang dapat memperkuat prasangka identitas. Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial di Kota Kupang perlu diarahkan pada pendidikan toleransi, literasi digital, dan dialog lintas komunitas bagi generasi muda. Dengan demikian, integrasi sosial dalam membangun Kota KASIH dapat terus dipertahankan tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui regenerasi nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sosial dalam membangun Kota KASIH di Kota Kupang berjalan baik karena tiga dimensi *civil sphere* saling menopang. Partisipasi aktif di ruang publik terwujud melalui Musrenbang inklusif dan RPJMD 2025-2029 sebagai *social contract* pembangunan. Solidaritas lintas identitas terlihat melalui toleransi aktif antarumat beragama dan keterlibatan warga dalam kehidupan sosial lintas komunitas. Pengakuan terhadap hak kelompok berbeda diwujudkan melalui pelayanan publik, program sosial, dan kebijakan pembangunan yang non-diskriminatif.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah perluasan penggunaan teori *civil sphere* dalam kajian integrasi sosial dan pembangunan daerah. *Civil sphere* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara partisipasi warga, solidaritas moral, pengakuan hak, dan kebijakan pemerintah daerah. Implikasi praktisnya, Pemerintah Kota Kupang perlu menjadikan Kota KASIH bukan hanya *branding*, tetapi sebagai prinsip kerja pemerintahan yang terukur melalui program inklusif, dialog lintas komunitas, dan penanganan ketimpangan sosial.

Rekomendasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota Kupang perlu memperkuat evaluasi program inklusif berbasis kecamatan dan kelurahan, Bappeda perlu memastikan Musrenbang benar-benar melibatkan kelompok rentan dan minoritas, Kesbangpol perlu memperkuat sistem deteksi dini primordialisme dan politisasi identitas, FKUB perlu memperluas dialog lintas iman bagi generasi muda, dan perangkat daerah perlu mempercepat penanganan RTLH serta ketimpangan sosial agar integrasi sosial tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi juga adil secara substantif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya bersifat kontekstual

dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Kedua, penelitian hanya dilakukan di Kota Kupang dengan enam informan sehingga belum mewakili seluruh dinamika sosial masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, penelitian belum mengukur integrasi sosial secara kuantitatif melalui indeks atau survei. Keempat, penelitian belum menganalisis secara longitudinal perubahan sikap toleransi masyarakat dari waktu ke waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian mendatang dapat diarahkan pada kajian integrasi sosial generasi muda di Kota Kupang, terutama untuk melihat bagaimana nilai toleransi diwariskan di tengah perubahan media digital. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji pengaruh media sosial terhadap toleransi dan potensi polarisasi identitas. Selain itu, perlu dikembangkan indeks integrasi sosial perkotaan yang dapat mengukur partisipasi publik, solidaritas lintas identitas, kepercayaan sosial, dan persepsi *non-diskriminasi*. Studi komparatif antarkota multikultural di Indonesia Timur, seperti Kupang, Ambon, Ternate, dan Manado, juga penting dilakukan untuk menemukan pola terbaik dalam menjaga *social cohesion* dan *social harmony*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pejabat Dinas Sosial, BAPPEDA, Badan Kesbangpol Kota Kupang, serta Ketua dan Pengurus FKUB Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga. Terima kasih pula kepada Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alexander, J. C. (2006). *The Civil Sphere*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195162509.001.0001

Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kota Kupang dalam angka 2025* (Number 53710.25001). https://kupangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c7de861383b713b03ba3dbdc/kota-kupang-dalam-angka-2025.html

Chumairah, S. M. (2019). Dinamika Toleransi di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan City of Tolerance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/540

Funai, J., & Martua, A. (2025). *Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang*. https://eprints.ipdn.ac.id/21958/

Kalsum, A. U., & Fauzan, F. (2019). Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat. *JAWI*, *2*(1), 65–86. https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2841

Lymperopoulou, K., Wiśniowski, A., & Laurence, J. (2022). Immigration, diversity and trust: The competing and intersecting role of English language ability in the community. *Ethnic and Racial Studies*, *45*(16), 189–215. https://doi.org/10.1080/01419870.2021.2021263

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Qi, J., Mazumdar, S., & Vasconcelos, A. C. (2024). Understanding the Relationship between Urban Public Space and Social Cohesion: A Systematic Review. *International Journal of Community Well-Being*, *7*, 155–212. https://doi.org/10.1007/s42413-024-00204-5

Reibold, K., Bachvarova, M., & Lenard, P. T. (2025). Introduction: Trust, social cohesion, and integration. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 1–18. https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2528379

Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46094/uu-no-5-tahun-1996

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Riazi, A. M., Cochrane, L., Moloney, K., & Mohamed, R. (2026). Social cohesion: A multi-dimensional and multi-faceted framework. *SN Social Sciences, 6*(80). https://doi.org/10.1007/s43545-026-01363-2

Saudale, J. M., Lattu, I. Y. M., & Ludji, I. (2025). Toleransi Antaragama dalam Perspektif Civil Sphere: Membangun Keberagaman Harmonis di Kota Kupang. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, *7*(1), 81–92. https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1587

Sena, I. G. M. W. (2020). Peran Umat Hindu dan Kristen dalam Menjaga Toleransi Kehidupan Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Harmoni, 19*(1), 100–114. https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.323

Sihombing, H. M., Tampake, T., & Lattu, I. (2025). Civil Sphere untuk Harmoni Sosial Islam-Kristen di Desa Inklusi Bah Sulung Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.240

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.

Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *4*(1), 119–128. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4714

Tory, F. T. D. P. F. (2025). Nagari dan Desa dalam Otonomi Desa: Sebuah Perspektif Komparatif. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/5527

Widarjanto, & Susilo, S. R. T. (2016). Integrasi sosial di perdesaan: Keterkaitan kawasan transmigrasi dengan desa-desa sekitar. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *6*(1), 110–121. https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.244

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(2), 119–135. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135